



Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri

**PEMBELAJARAN DARI MALAYSIA
DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**

SUMARNO

NIDN: 0304036604

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

2020

PEMBELAJARAN DARI MALAYSIA DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Oleh
Sumarno

Abstract

This paper aims at analyzing the decision of Malaysian federal government to relocate its capital city from Kuala Lumpur to Putrajaya in 1999. It is perceived as influenced by the fourth and the seventh Malaysian Prime Minister Dr. Tun Mahathir bin Mohammad, who has an obsession to transform Malaysia into a developed country but still maintaining its national identity. This is reflected in the fundamental doctrine that serves as a philosophy in designing Putrajaya: to nurture harmonious relationship between *Allah* (God), human, and nature. Putrajaya's masterplan is developed based on two key concepts: *city in the garden* and *intelligent city*. This paper concludes that there are some lessons learned that shall be derived from the relocation of Malaysia's capital city: the separation of the center of government from the capital city, which serves as the center of economic and financial activities; the promotion of Malay cultural values and Islam as national identity; the empowerment of the nation's potentials and identity through the motto of "*made in Malaysia and made by Malaysian*"; the refusal of financial assistance from foreign debt; and the city's design, which is environmentally friendly, supported by serene and beautiful scenery.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keputusan Pemerintah Federal Malaysia dalam memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tahun 1999. Keputusan itu merupakan obsesi PM Malaysia keempat dan ketujuh Dr. Tun Mahathir bin Mohammad untuk mengantarkan Malaysia menjadi negara maju tetapi tetap berpijak pada identitas nasionalnya. Hal itu tercermin dari doktrin dasar yang dijadikan filosofi dalam rancang bangun Putrajaya: harmoni relasi Allah, manusia dan alam. Masterplan Putrajaya didesain atas dasar dua konsep utama: *city in the garden* dan *intelligent city*. Ada beberapa pelajaran yang bisa dicatat dari pemindahan ibu kota Malaysia: pemisahan pusat pemerintahan dengan ibu kota negara yang menjadi pusat ekonomi dan keuangan; mengusung nilai-nilai budaya Melayu dan Islam sebagai identitas nasional; memberdayakan potensi dan jati diri bangsa melalui semboyan "*made in Malaysia dan made by Malaysian*"; tidak dibiayai dari

hutang luar negeri; dan desain kota yang bersahabat dengan lingkungan dengan panorama alam yang asri dan indah berseri.

1. Latar Belakang

Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Selasa 27/8/2019. Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi mengemukakan beban Jakarta sebagai ibu kota negara sudah cukup berat. Selain itu, pemindahan ibu kota ke luar Jawa juga dimaksudkan untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di luar Jawa sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan yang tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Dalam paparan Bappenas di acara Youth Talks pada 20 Agustus 2019, disampaikan sejumlah alasan mengapa ibu kota harus pindah ke luar pulau Jawa. Setidaknya ada empat alasan yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut: (1) Penduduk Jawa terlalu padat. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 menyebutkan sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali pulau Sumatera. Penduduk Sumatera sebesar 21,78 persen dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan di Kalimantan, persentase penduduk Indonesia hanya 6,05 persen atau 15.801.800 jiwa; (2) Kontribusi ekonomi terhadap PDB. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau PDB, sangat mendominasi, sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Jokowi ingin menghapuskan istilah "Jawasentris" sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot. Berdasarkan data BPS 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49 persen, sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek. Di Sumatera, kontribusinya sebesar 21,66 persen dan Kalimantan sebesar 8,2 persen dengan pertumbuhan ekonomi 4,33 persen; (3) Krisis

ketersediaan air. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu *concern* pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Di pulau Jawa, khususnya Jakarta, ketersediaan air bersih sudah mengalami krisis yang perlu diantisipasi; (4) Konversi lahan di Jawa mendominasi. Hasil modelling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan, konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa. Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan.¹

Pemindahan ibu kota suatu negara bukan hal baru dan bahkan bisa dikatakan sebagai fenomena global. Saat ini lebih dari 40 negara di berbagai belahan dunia sedang mempertimbangkan relokasi pusat pemerintahan mereka. Sebagian besar adalah negara berkembang tetapi ini juga merupakan tema yang berulang di banyak negara maju seperti Inggris, Korea Selatan dan Taiwan. Saat ini, tercatat lebih dari 30 negara telah melakukan pemindahan ibu kotanya. Amerika Serikat, bahkan lebih 9 kali melakukan pemindahan ibu kota negara, mulai dari Philadelphia tahun 1774 hingga ditetapkan di Washington DC saat ini sejak 17 November 1800.²

Memindahkan ibu kota negara bukan persoalan sederhana. Ada persoalan ekonomi, sosial, finansial, budaya, politik, pertahanan-keamanan dan sebagainya yang cukup kompleks. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemindahan ibu kota negara diperlukan perencanaan yang sangat matang, studi yang mendalam dan banyak belajar dari berbagai negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota negara. Salah satunya dari Malaysia.

Dalam wawancara khusus dengan *Tempo*, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia perlu belajar dari Malaysia yang sukses memindahkan ibu kotanya

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/09284821/4-alasan-mengapa-ibu-kota-indonesia-harus-keluar-dari-pulau-jawa?page=all>

² Suyatno, *Moving Capital City and Geopolitics of Indonesia*, makalah seminar “Moving Capital City: Comparison Studies Between Indonesia and Malaysia” di Universiti Utara Malaysia (UUM), Kampus Kuala Lumpur, 8 Desember 2019.

dari Kuala Lumpur ke Putrajaya dalam waktu singkat. "Saya belajar dari Putrajaya, tiga tahun bisa pindah. Memang harus pindah," kata Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2019. Putrajaya saat ini merupakan pusat pemerintahan Malaysia, menggantikan Kuala Lumpur. Pada pekan kedua Agustus lalu, Jokowi berkunjung ke Putrajaya bertemu PM Malaysia Mahathir Mohamad.³

Hal serupa juga pernah disampaikan Presiden SBY. Akhir September 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah keterangan pers, secara khusus menyebut Putrajaya sebagai salah-satu opsi pemindahan pusat pemerintahan, yang bisa ditiru. "Kita bisa membandingkan dengan apa yang dilakukan Malaysia. Ibu kota Malaysia tetap Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahan di Putrajaya. Dipisahkan, *cut off*." kata SBY.⁴

2. Permasalahan

1. Bagaimana proses pemindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya?
2. Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Indonesia terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur?

3. Metode Penelitian

Untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian yang diajukan tersebut, metode penelitian yang digunakan ada dua: penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan melalui kunjungan ke dua ibu kota Malaysia yakni Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk melihat langsung bagaimana keadaan kedua ibu kota Malaysia tersebut. Selain itu, dalam kunjungan itu, juga dilakukan diskusi dengan para akademisi di

³ <https://bisnis.tempo.co/read/1238561/wawancara-khusus-jokowi-pindah-ibu-kota-belajar-dari-malaysia>

⁴ https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/10/101029_seri4jakartapindah;
<https://nasional.kompas.com/read/2010/09/03/19393338/sby.pindahkan.ibu.kota.solusi.kemacetan>.

Universiti Utara Malaysia tentang “*Moving Capital City: Comparison Studies Between Indonesia and Malaysia.*”⁵

Sedangkan studi pustaka dilakukan untuk mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan para akademisi tentang pemindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

4. Pembahasan

4.1. Pengalaman Malaysia dalam Pemindahan Ibu Kota

Sejak 1999, Malaysia memiliki dua ibu kota: Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia sejak negara itu meraih kedaulatan politiknya dari Inggris tahun 1957. Kuala Lumpur menjadi pusat pemerintahan dan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis yang sangat sibuk. Seperti halnya Jakarta dan ibu kota-ibu kota negara lainnya, saat itu beban Kuala Lumpur yang menyanggah banyak predikat: pusat pemerintahan, pusat jasa, perdagangan dan bandul perekonomian serta impian kaum urban, cukup berat. Fenomena klasik kota metropolitan seperti macet, polusi udara, masalah kependudukan, permukiman dan lingkungan, banjir, juga terjadi di Kuala Lumpur. Namun, sejak 1999, pusat administrasi pemerintahan direlokasi dari Kuala Lumpur ke sebuah kawasan yang berjarak sekitar 25 km di selatan kota yakni Putrajaya⁶. Kini, Putrajaya menyanggah status sebagai *The Federal Administrative Center* atau *administrative capital* atau pusat pentadbiran kerajaan.

Penetapan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan federal, merupakan obsesi visioner PM Malaysia keempat, Tun Dr. Mahathir Mohammad⁷. Pertengahan

⁵ Kunjungan dan diskusi dilaksanakan tanggal 8 Desember 2019.

⁶ Perbandingan antara Kuala Lumpur dan Putrajaya cukup menarik dianalisis dalam Ross King, *Kuala Lumpur and Putrajaya, Negotiating Urban Space in Malaysia*, NUS Press: Singapore, 2008.

⁷ Mahathir Mohammad merupakan perdana menteri terlama Malaysia. Ia menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat sejak 16 Juli 1981 hingga 30 Oktober 2003 dan kembali menjadi PM ketujuh sejak 10 Mei 2018 hingga 24

1980-an, saat menjabat sebagai PM, Mahathir melihat perkembangan Kuala Lumpur sedemikian pesat dan tidak representatif lagi menjadi ibu kota negara. Oleh sebab itu ia melontarkan gagasan perlunya pemisahan ibu kota negara dengan ibu kota pemerintahan. Rencana Mahathir tersebut, pada mulanya ditolak sejumlah pihak, khususnya oleh kalangan oposisi yang menyebutnya sebagai tidak realistis, pemborosan uang negara dan tidak efisien. Akan tetapi, pada tahun 1993 parlemen Malaysia akhirnya menyetujui proyek ambisius itu.⁸ Publikasi ilmiah tentang pemindahan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, telah banyak ditulis para akademisi atau peneliti, baik dalam bentuk buku, penelitian untuk tesis atau disertasi, jurnal atau artikel lepas di media. Antara lain karya Chin Siong Ho, akademisi dari Universitas Teknologi Malaysia yang berjudul *Putrajaya Administrative Centre of Malaysia Planning Concept and Implementation*,⁹ peneliti dari Faculty of Architecture Building and Planning, University of Melbourne, Victoria, Australia Ross King, *Kuala Lumpur and Putrajaya, Negotiating Urban Space in Malaysia*¹⁰ dan *Re-writing the City: Putrajaya as Representation*,¹¹ peneliti University of Florida Levu 'Vincent' Tran, *In The Name of Utopia, The Case Study of Putrajaya*¹², Malaysia's Planned Administrative Capital, Director of the Urban Studies Program at McGill University Sarah Moser, *Putrajaya: Malaysia's new federal administrative*

Februari 2020 saat ia mengundurkan diri karena konflik politik dalam internal koalisi Pakatan Harapan yang ia bentuk untuk mengalahkan PM Moh. Najib bin Abdul Razak dalam Pemilu 2018.

⁸ Selama menjadi Perdana Menteri, Mahathir memiliki sejumlah program ambisius yang dimaksudkan untuk mengantarkan Malaysia menjadi negara maju, antara lain pembangunan menara kembar Petronas, bandara internasional KLIA, pemindahan ibu kota, pembangunan Cyberjaya sebagai *silicon valley*-nya Malaysia, pembangunan *Multimedia Super Coridor* (MSC) yang membentang dari KLCC hingga bandara internasional KLIA. Obsesi Mahathir tentang Malaysia yang maju dan memiliki kebanggaan nasional dalam pergaulan antarbangsa ia tuangkan dalam Wawasan 2020 (Visi 2020). Lihat Abu Hasan Adam, *Menghala Wawasan 2020*, Arena Ilmu, Kuala Lumpur, 1992

⁹ Chin Siong Ho, *Putrajaya Administrative Centre of Malaysia Planning Concept and Implementation*, http://eprints.utm.my/id/eprint/6622/1/HoChinSiong2006_Putrajaya-AdministrativeCentre_OfMalaysia.pdf. Makalah ini dipresentasikan pada Expert Group Conference di Sungkyunkwan University Seoul pada 16 November 2006.

¹⁰ Ross King, *Kuala Lumpur and Putrajaya, Negotiating Urban Space in Malaysia*, NUS Press: Singapore, 2008.

¹¹ Ross King, "Re-writing the City: Putrajaya as Representation", *Journal of Urban Design*, Vol. 12. No. 1, February 2007. Ross King juga menulis buku *Kuala Lumpur and Putrajaya, Negotiating Urban Space in Malaysia*, NUS Press: Singapore, 2008.

¹² Levu 'Vincent' Tran, *In The Name of Utopia, The Case Study of Putrajaya*, University of Florida, 2010.

capital,¹³ dan lain-lain. Bahkan para jurnalis atau traveler yang takjub dengan desain kota Putrajaya yang sangat indah juga banyak menulis dalam media, blog, media sosial atau membuat audiovisual dalam berbagai channel youtube mereka.

Pada mulanya, Pemerintah Malaysia mempertimbangkan enam wilayah yang akan dijadikan pusat pemerintahan baru. Enam wilayah itu adalah North West Rawang, Janda Baik/Bukit Tinggi, North Port Dickson, Sepang Coast, Kenaboi Plains, dan Prang Besar. Akhirnya, Prang Besar dipilih oleh pemerintah Malaysia. Alasannya, daerah itu lebih memenuhi syarat: biaya akuisisi tanah dan infrastruktur lebih murah, lokasi yang strategis, akses yang baik ke jaringan transportasi utama (kereta api, jalan raya dan pelabuhan), berpotensi memberikan dampak positif kepada daerah sekitarnya, adanya vegetasi alami dan konjungtur tanah yang menunjang, serta minimnya dampak negatif kepada masyarakat lokal. Kawasan Prang Besar saat itu adalah ladang perkebunan kelapa sawit seluas 4.931 hektar yang terpencil dan minim penduduk di negara bagian Selangor.¹⁴

Ross King, menambahkan alasan pemilihan Putrajaya sebagai pusat administrasi pemerintah Federal Malaysia, antara lain lokasinya strategis karena terletak antara Kuala Lumpur dan bandara internasional Kuala Lumpur International Airport, infrastruktur jalan sudah tersedia dan yang paling signifikan adalah pembebasan lahannya mudah karena tanah yang sebagian besar perkebunan kelapa sawit itu berada dalam satu kepemilikan dan hanya dihuni sedikit orang sehingga menghindarkan pemerintah dari masalah yang sensitif (yakni pengusuran, *pen*).¹⁵

Pada bulan Oktober 1994, kabinet menyetujui usulan Mahathir perubahan nama Prang Besar menjadi Putrajaya. Nama itu diabadikan untuk menghormati

¹³ Sarah Moser, *Putrajaya: Malaysia's new federal administrative capital*, *Cities* 27, August 2010. *CITIES* adalah *The International Journal of Urban Policy and Planning*.

¹⁴ Chin Sing Ho, hal. 4

¹⁵ Ross King, *Re-writing the City: Putrajaya as Representation*, hal. 121

jasa-jasa Tunku Abdul Rahman Putra, Bapak Kemerdekaan Malaysia dan PM Malaysia pertama¹⁶. Dalam bahasa Melayu, Putrajaya memiliki arti penting: “Putra” diartikan sebagai 'pangeran yang mulia'. dan 'Jaya', diterjemahkan sebagai 'keberhasilan', 'kemenangan' atau kejayaan. Dengan demikian, Putrajaya dibangun tidak hanya untuk merepresentasikan Malaysia baru di era globalisasi tetapi juga untuk menunjukkan kemampuan negara itu membangun model kota baru yang terencana, modern, terintegrasi, dan menyediakan lingkungan kerja yang lebih produktif.¹⁷

Master Plan pembangunan pusat pemerintahan baru itu disetujui kabinet pada bulan Februari 1995. Karena secara administratif kawasan Putrajaya masuk dalam wilayah Negara Bagian Selangor, maka pada tanggal 20 Juli 1995 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian Selangor, berdasarkan Pasal 80 (5) Konstitusi Federal yang pada intinya memberi wewenang kepada Pemerintah Federal untuk mengelola wilayah Putrajaya atas nama Pemerintah Federal untuk mendirikan Pusat Administrasi Pemerintahan Federal.

Pada tahun 1995, pemerintah Malaysia membentuk Perbadanan Putrajaya (*Putrajaya Corporation*) yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan kota baru Putrajaya. Selain itu, juga dibentuk *Putrajaya Holding Sdn. Bhd* sebagai pengembang yang bertanggungjawab pada pembangunan fisik kota dengan segala infrastrukturnya. Perbadanan Putrajaya berada di bawah Kementerian Wilayah Federal Malaysia dan bertanggung jawab atas perencanaan kota, kesehatan dan sanitasi masyarakat, pembuangan dan pengelolaan limbah,

¹⁶ Tentang peran Tunku Abdul Rahman Putra dalam kemerdekaan Malaysia, dapat disimak dalam Biografi Tokoh Dunia: Tunku Abdul Rahman, <https://internasional.kompas.com/read/2019/02/08/20291541/biografi-tokoh-dunia-tunku-abdul-rahman-bapak-kemerdekaan-malaysia?page=1>. Pemberian nama Putrajaya oleh Mahathir untuk nama “ibu kota baru” yang dinisbahkan kepada nama Tunku Abdul Rahman Putra, menunjukkan jiwa besar dan obyektifitas Mahathir. Pasalnya, dalam karir politiknya, ia beberapa kali berseteru dengan perdana menteri pertama itu. Saat terjadi kerusuhan rasial tahun 1963 antara etnis Melayu dan China Tahun 1969, Mahathir dikeluarkan dari kepengurusan UMNO oleh Tunku Abdul Rahman yang saat itu menjabat

¹⁷ Perbadanan Putrajaya, 1999

perlindungan lingkungan dan kontrol bangunan, pembangunan sosial dan ekonomi, serta fungsi pemeliharaan umum infrastruktur perkotaan.¹⁸

Pada tanggal 29 Agustus 1995 secara resmi *The Putrajaya Project* diluncurkan PM Malaysia. Sehari setelah *dilaunching*, yakni tanggal 30 Agustus 1995, Sidang Kabinet PM Mahathir menyetujui mekanisme pembiayaan pembangunan Putrajaya secara patungan di bawah Putrajaya Holdings Sdn Bhd (PHSB) yang terdiri dari PETRONAS (40%) Khazanah Holdings (40%) dan Dana Perwalian Negara (20%).¹⁹

Setelah melalui berbagai persiapan, tanggal 10 September 1996, PM Mahathir melakukan *ground-breaking ceremony* peletakan batu pertama pembangunan kompleks pemerintahan. Sejak saat itu, pembangunan ibu kota baru Malaysia dimulai.

Saat proyek pembangunan mulai berjalan, di akhir 1990-an, perekonomian dunia, khususnya Asia Tenggara, tengah dilanda krisis. Hal itu berdampak pada proyek pembangunan Putrajaya. PM Mahathir saat itu mendapat cemoohan dari pihak oposisi. Pemindahan pusat pemerintahan itu dinilai pemborosan karena memakan biaya hingga 5 miliar ringgit atau setara US \$1,3 miliar. Apalagi, kondisi ekonomi Malaysia tengah susut 6% pada 1998 akibat krisis moneter yang melanda Asia Tenggara. Akibatnya Malaysia membatalkan beberapa proyek penting seperti bandara regional, jalan raya, dan bendungan listrik tenaga air senilai US\$5 miliar. Meskipun begitu, proyek Putrajaya tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana, tetapi dilakukan dengan hening. *New York Times* pada 27 April 1999 pun menyebutkan proyek pembangunan pusat pemerintahan baru Malaysia itu dilakukan secara 'diam-diam.' Para pekerja

¹⁸ Tentang Perbadanan Putrajaya lihat <https://www.ppj.gov.my/>

¹⁹ Kronologi Pembangunan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya, lihat blog resmi Perbadanan Putrajaya; <https://blog.ppj.gov.my/2014/05/kronologi-pembangunan-pusat-pentadbiran.html>

yang diimpor dari Indonesia dan Bangladesh pun berperan besar dalam pembangunan pusat pemerintahan baru Malaysia tersebut.²⁰

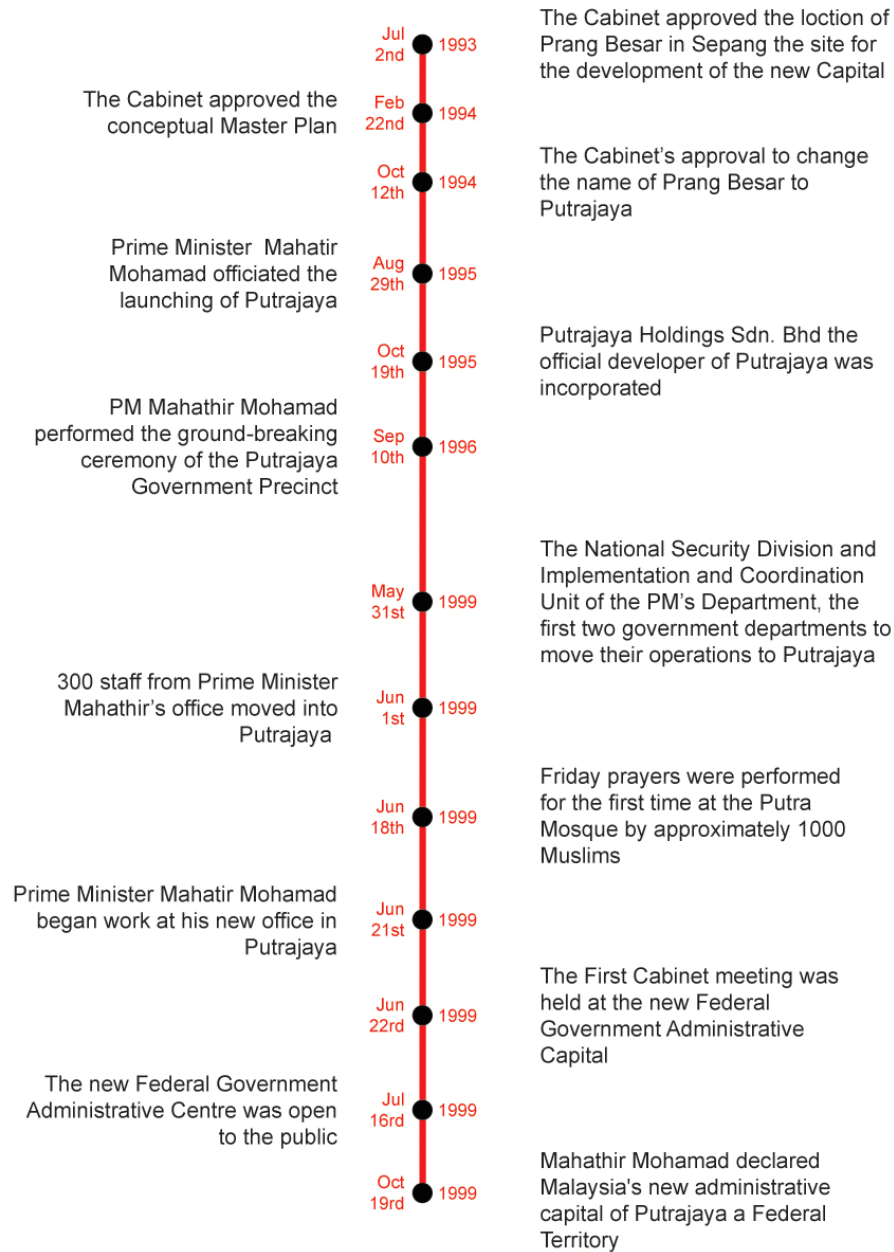
Kepada para pengritiknya itu, menurut Mohamad Sukeri Bin Khalid dari School of Government College of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia, Mahathir menyatakan “*We build things we can use and it is meant for the government of the future, maybe 100 years, 300 years, 1,000 years, I wouldn’t know, I won’t be around by then.*”²¹

Setelah sejumlah fasilitas pemerintahan selesai dibangun, pada pertengahan tahun 1999 secara bertahap mulai dilakukan pemindahan administrasi pemerintahan federal dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Awal Juni 1999, sekitar 300 staf kantor PM Malaysia pindah ke Putrajaya. Pada tanggal 18 Juni 1999, sholat Jumat pertama kali diselenggarakan di Masjid Putra yang menjadi salah satu ikon Putrajaya. Momen cukup penting terjadi tanggal 21 Juni 1999 ketika PM Malaysia Mahathir Mohammad mulai pindah ke Putrajaya dan mulai bekerja di kantor pemerintahan yang baru. Tanggal 22 Juni 1999, sidang kabinet pertama dilaksanakan di Putrajaya. *Timeline* berikut adalah kronologi pemindahan pusat administrasi pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya:²²

²⁰ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190513/19/921957/rencana-pemindahan-ibu-kota-belajar-dari-pengalaman-putrajaya>

²¹ Mohamad Sukeri Bin Khalid, “*Moving Capital City: Comparison Studies Between Indonesia and Malaysia,*” makalah seminar di UUM Kuala Lumpur, 8 Desember 2019.

²² Levu ‘Vincent’ Tran, hal. 29. Sebagai perbandingan lihat juga blog resmi Perbadanan Putrajaya tentang Kronologi Pembangunan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya, lihat blog resmi Perbadanan Putrajaya; <https://blog.ppi.gov.my/2014/05/kronologi-pembangunan-pusat-pentadbiran.html>



4.2 Konsep Tata Kota

Putrajaya merupakan proyek pembangunan perkotaan terintegrasi terbesar di Malaysia. Putrajaya dirancang untuk mengkonsolidasikan kementerian pemerintah di satu lokasi agar mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai ibukota baru, Putrajaya dirancang untuk menjadi kebanggaan bangsa, 'kota taman cerdas' yang

terencana dengan baik, menyenangkan secara estetika, ramah lingkungan, dan dengan area terbuka hijau dan untuk menjaga warisan budaya dan identitas Malaysia dan Islam.²³

Berbeda dengan dua mega proyek Mahathir sebelumnya, yakni Menara Petronas di Kuala Lumpur City Centre dan Bandara Internasional Kuala Lumpur yang merupakan hasil dari kompetisi desain internasional²⁴, proyek pembangunan Putrajaya dari mulai perencanaan sampai dengan tahap pembangunan, benar-benar “*made-in-Malaysia*’ and ‘*made-by-Malaysian*”. Putrajaya adalah usaha yang sepenuhnya lokal, direncanakan dan dilaksanakan oleh perencana, konsultan, kontraktor dan mitra usaha patungan lokal Malaysia.

Pembangunan Putrajaya mengadopsi arsitektur modern yang futuristik yang dipelajari dari berbagai negara tetapi didasarkan pada nilai-nilai Malaysia yang khas, yakni budaya Melayu dan Islam. Ada dua tema utama yang diusung dalam Masterplan Putrajaya yakni “*City in the Garden*” and “*Intelligent City.*” Masterplan ini didasarkan pada tiga doktrin fundamental yang menjadi filosofi penataan kota baru itu yakni *relationship between man and Creator*, *relationship between man and man* dan *relationship between man and environment*.²⁵

Tema dan falsafah itu diterjemahkan dalam desain dan peruntukan bangunan di Masterplan Putrajaya. Dalam Rencana Induk pembangunan, kawasan seluas 4930 hektar itu dibagi menjadi dua area utama, yakni *Core Area* (wilayah inti) dan *Peripheral Area* (wilayah penunjang atau pinggiran).²⁶ Wilayah inti

²³ The Intelligent Garden City of Putrajaya, <https://newcities.org/cityquest-putrajaya-malaysia-designed-intelligent-garden-city/>

²⁴ Menara kembar Petronas dirancang oleh arsitek César Pelli dari Argentina dan dibangun oleh konsorsium pengembang dari Jepang dan Korea Selatan. Sementara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) dirancang oleh arsitek Jepang Kisho Kurokawa.

²⁵ Chin Siong Ho, hal. 7 dan Levu ‘Vincent’ Tran, hal. 20

²⁶ Ibid, hal. 41-42. Lihat juga Sarah Moser, *Putrajaya: Malaysia’s new federal administrative capital*, Cities 27, August 2010, hal. 290; https://www.researchgate.net/publication/248501612_Putrajaya_Malaysia's_new_federal_administrative_capital

merupakan jantung kota dan mencakup luas total 1069 hektar. Wilayah inti dibagi dalam lima koridor, yaitu: areal pemerintahan, komersial, budaya, area campuran, olahraga dan rekreasi. Sedangkan *periphery* dirancang untuk lingkungan permukiman, apartemen, *townhouse*, supermarket, area kuliner di mana masyarakat bisa berbelanja dan makan.

Pembangunan kota ini betul-betul direncanakan dengan matang. Penempatan bangunan dan peruntukannya terintegrasi dan tertata sedemikian rupa sehingga memudahkan akses jangkauannya. Hal itu terlihat dengan kapling-kapling pembagian kawasan dalam 20 *precinct* (daerah kecil/sektor) dengan peruntukan yang berbeda-beda namun saling terkoneksi.

Karena disiapkan sebagai pusat pemerintahan, maka bangunan utama di Putrajaya adalah kompleks pemerintahan. Namun seiring dengan itu, juga dibangun kompleks perumahan untuk para pegawai pemerintah yang akan dipindahkan bersamaan dengan pemindahan administrasi pemerintahannya. Selain itu, juga dilakukan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan keseharian para pegawainya, seperti pusat peribadatan, lingkungan pendidikan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, sarana rekreasi dan olah raga, moda transportasi terintegrasi dan tentu saja infrastruktur jalan raya yang tertata rapi.

Desain kompleks pemerintahan cukup unik. Di tengah *core area* dibangun Putrajaya Boulevard layaknya sebuah *grand axis* (sumbu/poros besar) yang membentang dari selatan ke utara sepanjang 4,2 km dan lebar 100 m dengan titik fokusnya pada sebuah sumbu yang diarahkan menuju qiblat ke baitullah di Mekah.²⁷ Semua departemen kementerian dibangun berderet di sepanjang sumbu dan di ujungnya diakhiri dengan bangunan megah kantor Perdana

²⁷ Levu, hal. 21

Menteri. Di Putrajaya Boulevard inilah peringatan hari besar nasional Malaysia, seperti hari kemerdekaan, sering diselenggarakan.

Konsep pembangunan “*city in the garden*” (bandar dalam taman) menjadi unggulan pembangunan di Putrajaya. Hal itu terlihat dari alokasi lebih dari sepertiga lahan (37,5%) untuk lahan terbuka hijau, (25,8%) untuk perumahan, fasilitas publik (10.1%) dan untuk kompleks pemerintahan sebesar 5,3%. Infografis berikut lebih detail menjelaskan hal itu:²⁸

²⁸ Sarah Moser, hal. 292

Official name	Putrajaya, the Federal Administrative Center	
Location	25 km South of Kuala Lumpur, 20 km north of Kuala Lumpur International Airport (KLIA)	
Population (current)	Almost 100,000	
Population (projected)	330,000	
Total size	4930 hectares	
Land use (%)	Government	5.3%
	Commercial	2.9%
	Residential	25.8%
	Civic and cultural	0.2%
	Public facilities	10.1%
	Utility and infrastructure	18.2%
	Green areas	37.5%
Development Components	Core area	1069.1 ha
	Government precinct	236.2 ha
	Mixed development precinct	55.2 ha
	Civic and cultural precinct	35.3 ha
	Commercial precinct	213.3 ha
	Sports and recreational	329.1 ha
	Water bodies, wetlands and lake	585.6 ha
	Periphery area	2925.3 ha
Transportation systems	Putrajaya Boulevard	100 m wide, 4.2 km long
	Intracity – monorail, taxi buses	
	Intercity – express rail link, north–south link	
	KL-Putrajaya-KLIA dedicated highway	
Implementation	KL-Seremban Highway	
	Statutory authority	Perbadanan Putrajaya
	Developer	Putrajaya Holdings Sdn Bhd
	Project manager	Kuala Lumpur City Center Bhd

* Adapted from Abidin, Azizan Zainul, 'Putrajaya: Building for prosperity' in Yeoh, Michael. (2002) *21st Century Malaysia: Challenges and Strategies in Attaining Vision 2020*. London: Asean Academic Press, p. 183.

Alokasi sepertiga wilayah untuk lahan terbuka hijau membuat kota ini tampak indah dan asri. Konsep “bandar dalam taman” (*city in the garden*) sangat terasa dalam pembangunan Putrajaya. Banyak ibukota di dunia sering dikenal dengan arsitektur dan gedung-gedung pencakar langitnya, akan tetapi Putrajaya ingin dikenal sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekologi yang selaras antara alam dan keindahan arsitektur kotanya. Tanaman hijau subur, kebun raya, dan taman tersebar di seluruh bentang alam yang ditunjang oleh perairan dan lahan

basah yang luas. Karena kota ini dibangun di atas lahan bekas perkebunan kelapa sawit maka suhu udara di sekitar cukup panas sehingga dibuatlah sebuah danau buatan, taman-taman kota yang ditanami aneka spesies tanaman yang mengelilingi kota Putrajaya yang berfungsi sebagai paru-paru hijau kota. Kota ini juga didesain sebagai “kota rendah karbon.”

Ada sejumlah taman indah di Putrajaya, antara lain : Taman Putra Perdana, Taman Botani (*Botanical Garden*), Taman Wetland (*Wetland Park*), Taman Warisan Pertanian (*Agriculture Heritage Park*), dan Taman Ekuestrien Putrajaya (*Putrajaya Equestrian Park*). Taman itu dibagi menjadi 5 tema berbeda seperti *Explorer's Trail, Palm Hill, Floral Gardens, Sun Garden, dan Lakeside*.

Di jantung Putrajaya ada lahan basah Putrajaya (*Wetland*) dengan pemandangan alam yang didominasi oleh Danau Putrajaya (orang Malaysia menyebutnya Tasik Putrajaya). Lahan basah Putrajaya (200 hektar) merupakan tempat berkembang biak burung dan sistem penyaringan alami yang akan menyerap polutan dari air sungai hulu, menyaringnya, sehingga airnya berkualitas baik setelah memasuki danau. Danau dan lahan basah hanyalah dua fitur kota yang lebih khas. Danau Putrajaya seluas 650 hektar dirancang untuk bertindak sebagai sistem pendinginan alami untuk kota serta sebagai tempat kegiatan rekreasi termasuk memancing, olahraga air, dan transportasi air. Danau buatan ini didesain berkelok-kelok mirip sungai sehingga tampak alami dan menjangkau hampir seluruh presint (wilayah) Putrajaya.

Taman dan kebun tampil menonjol di kota taman ini. Salah satunya adalah Kebun Raya yang indah di pintu masuk utara Kantor Pemerintah yang berfungsi sebagai paru-paru hijau perkotaan. Taman Botani (Kebun Raya) dirancang sebagai tempat perlindungan nasional untuk koleksi taksonomi tanaman hidup Malaysia serta pusat pendidikan dan penelitian. Terletak di bagian utara Precinct 1, taman dirancang sebagai actinium atau tempat perlindungan

nasional untuk taksonomi tanaman Malaysia, serta pusat pendidikan dan penelitian. Taman Botani merupakan kebun raya terbesar di Malaysia seluas 92 hektar yang mengoleksi sekitar 700 spesies tanaman Malaysia serta mereka dari Asia-Pasifik dan Afrika.

Pemandangan panorama Putrajaya dapat dinikmati dari Putra Perdana Park yang berlokasi di titik tertinggi di sekitar Putrajaya. Taman ini terhampar di 70 hektar dan dikelilingi oleh Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sedangkan Perdana Walk, taman linear, menghubungkan Persiaran Perdana dengan Dataran Putra. Taman Rimba Alam dan Taman Jati dirancang sebagai taman hutan rekreasi berkelanjutan dengan jalur alam, jalur bersepeda, dan lokasi berkemah.

Selain dirancang sebagai kota hijau atau “kota dalam taman”, Putrajaya juga didesain sebagai *intelligent city*. Putrajaya terletak di dalam area *Multimedia Super Corridor* (MSC), yang merupakan wilayah dengan pertumbuhan tercepat di Malaysia. MSC mewakili wilayah teknologi pertama Malaysia yang membentang dari Kuala Lumpur City Center (KLCC) ke Kuala Lumpur International Airport (KLIA) meliputi panjang 50 km dan lebar 15 km. Pengembangan koridor taman ini didukung oleh infrastruktur telekomunikasi digital berkapasitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar internasional dalam semua aspek yang berkaitan dengan kapasitas, keandalan dan harga. Di sisi barat Putrajaya adalah kota Cyberjaya, kota teknologi lainnya yang berfungsi sebagai nodus dari MSC.²⁹ MSC direncanakan dibagi menjadi tujuh kawasan: (1) KLIA; (2) Airport City; (3) Putrajaya; (4) Cyberjaya; (5) Cyber Village; (6) Tele-Suburb; and (7) High-Tech Parks for Research and Development. Dilengkapi dengan sumber daya yang canggih, termasuk jaringan kabel internet

²⁹ Chin Siong Ho, hal. 2

berkekuatan 10 gigabit, Putrajaya bertekad untuk menjadi ibukota *paperless* pertama di Asia untuk memenuhi tantangan milenium berikutnya.³⁰

Keindahan desain kota Putrajaya disempurnakan dengan dibangunnya dua masjid megah, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Masjid Putra berlokasi di sebelah kiri kantor Perdana Menteri dan bernuansa warna merah bata perpaduan merah jambu atau pink. Letaknya berada di pinggir danau, sehingga terlihat seperti mengapung jika dilihat dari kejauhan. Selain Masjid Putra, ada juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin berada tak jauh dari *Palace of Justice*. Keunikan masjid ini adalah sebagian besar bahan bangunannya menggunakan besi sehingga disebut juga Masjid Besi.

4.3 Politik dan Pemerintahan

Karena Putrajaya berstatus sebagai pusat pemerintahan, maka bangunan utama yang paling penting di kawasan itu adalah gedung-gedung pemerintah dengan berbagai fasilitas penunjangnya. Pusat pemerintahan terletak di Precinct 1 – 5. Di Precinct 1 yang menempati semenanjung yang dibatasi oleh danau dan lahan basah di sebelah barat dan timur berdiri megah *Perdana Putra Building* yang merupakan Kantor Perdana Menteri. Gedung ini berdiri di sebuah bukit dengan desain sangat unik, mirip masjid menggabungkan elemen arsitektur Islam-Mogul, dengan atap bernada hijau yang menyatu di kubah utama mosaik kaca berbentuk bawang yang merupakan replika Masjid Zahir di Alor Setar, Kedah. Bangunan itu dikelilingi empat kubah kecil yang menunjukkan warisan Melayu dan Islam. Perdana Putra yang berwarna dominan coklat dan hijau ini mulai dibangun pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 1999 dengan arsitek putra pribumi Ahmad Rozi Abdul Wahab dari Qidean Architect. Perdana Putra menghadap ke Danau Putrajaya, Masjid Putra, dan Dataran Putra. Kompleks kantor berlapis batu alam enam lantai itu terdiri dari

³⁰ Levu, hal. 24

kantor Perdana Menteri, kantor Wakil Perdana Menteri dan Sekretaris Kepala untuk Pemerintah.



Kantor Perdana Menteri di kawasan Perdana Putra berdiri megah dengan kubah warna hijau yang khas mirip masjid. Di seberangnya berdiri Masjid Putra dengan kubah warna pink dan menara setinggi 116 m. Bangunan itu berdiri di pinggir Danau Putrajaya sehingga kelihatan seperti mengapung di danau.

Sumber: <https://www.getyourguide.com/kuala-lumpur-1171/kuala-lumpur-putrajaya-tour-with-traditional-boat-cruise-t209247/>

Selain Perdana Putra, di kompleks pemerintahan juga berdiri gedung-gedung kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Semua gedung pemerintahan tersebut didesain dengan unik dan menarik, sebagian besar bergaya modern dan futuristik. Selain, Kantor Perdana Menteri Malaysia, bangunan yang desainnya cukup unik adalah Istana Kehakiman (*Palace of Justice*). Gedung ini terletak di pinggi jalan raya utama, di Presint 3. Gedung Istana Kehakiman sangat cantik karena memadukan tiga gaya arsitektur yaitu Islami, Moor dan

Barat. Hal ini bisa dilihat dari tiga kubahnya yang berwarna emas mirip dengan Taj Mahal di India.

Meskipun Putrajaya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat lengkap, hingga saat ini, tidak semua kantor lembaga negara dipindahkan ke Putrajaya. Sebagian besar kedutaan besar negara asing (termasuk Kedutaan Besar Indonesia) juga tetap berada di Kuala Lumpur.³¹ Tiga kementerian, dari 31 kementerian, juga masih berada di Kuala Lumpur, yakni Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kerja Raya. Namun, 28 kementerian lainnya telah berkantor di Putrajaya. Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kehakiman, Kemenristek dan Inovasi dan lain-lain.³²

Di antara yang tetap di Kuala Lumpur adalah Parlemen atau Dewan Rakyat (semacam Dewan Perwakilan Rakyat) dan Kesultanan atau Yang di-Pertuan Agong. Hal itu karena pada tahun 1974 ada kesepakatan antara Pemerintah Federal dan negara bagian Selangor yang ditandatangani oleh Sultan Selangor Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Isinya Selangor bersedia menyerahkan Kuala Lumpur, lahan seluas 243 kilometer persegi, kepada Pemerintah Federal untuk dijadikan ibu kota dan wilayah persekutuan yang baru dibentuk Pemerintah Federal pada saat itu. Salah satu klausul dalam perjanjian ini adalah Wilayah Federal di mana Kuala Lumpur berada akan kembali ke Negara Bagian Selangor jika parlemen dan Sultan (Yang di-Pertuan Agong) dipindahkan ke tempat lain di luar Kuala Lumpur. Pemerintah Federal di bawah kepemimpinan Mahathir

³¹ Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur rencananya akan membangun gedung baru di Wisma Putra, Putrajaya. Menurut Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Rusdi Kirana, KBRI memiliki tanah seluas 2 hektar di Putrajaya. Gedung KBRI Putrajaya rencananya akan dijadikan sebagai pusat pelayanan dan diplomasi ekonomi. <http://www.harnas.co/2020/02/20/kbri-kuala-lumpur-akan-bangun-gedung-di-putrajaya>

³² <http://www.kabinet.gov.my/bkpp/index.php/anggota-pentadbiran/menteri>

saat itu tidak siap untuk mengembalikan Kuala Lumpur kepada Selangor. Itulah sebabnya, hingga saat ini Parlemen tetap berada di Kuala Lumpur.³³

Meskipun tempat tinggal resmi Yang di-Pertuan Agong adalah Istana Negara, di Kuala Lumpur, kepala negara Malaysia itu juga dibangun istana yang cukup megah di Putrajaya, yang dinamakan Istana Melawati. Istana ini dijuluki sebagai *Istana Hinggap*, karena istana ini hanya dipakai saat Yang di Pertuan Agong menghadiri Majelis Raja-Raja untuk memilih Raja Malaysia berikutnya.³⁴

Ketika Putrajaya selesai dibangun pada tahun 1999, Malaysia memberi status *Federal Territories* (wilayah persekutuan), semacam daerah khusus kepada Putrajaya sehingga tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Selangor tetapi langsung berada di bawah Pemerintah Federal. Malaysia memasukkan Putrajaya dalam satu dari tiga wilayah persekutuan di samping Kuala Lumpur dan Labuan. Malaysia juga membentuk Kementerian khusus yang disebut Kementerian Wilayah Persekutuan³⁵ untuk mengelola tiga wilayah tersebut.³⁶

Hal lain yang penting dicatat adalah mekanisme pembiayaan pemindahan ibu kota. Sesuai dengan keputusan pemerintah tanggal 30 Agustus 1995, pembiayaan pembangunan Putrajaya tidak dibebankan kepada anggaran negara secara langsung tetapi melalui konsorsium yang dibentuk pemerintah

³³ Levu (2010), hal. 32 dan Ross King (2008)

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Yang_di-Pertuan_Agong

³⁵ Tentang Kementerian Wilayah Persekutuan dapat dilihat di <http://www.kwp.gov.my/>. Tetapi alamat ini, kini sedang dalam perbaikan sehingga tidak bisa diakses.

³⁶ Wilayah Persekutuan (*Federal Territories*) merupakan salah satu jenis pembagian wilayah administratif di Malaysia yang setara dengan posisi negara bagian Malaysia, tetapi diatur langsung oleh Pemerintah Federal Malaysia di bawah yurisdiksi Kementerian Wilayah Persekutuan yang secara struktural berada di bawah kekuasaan Perdana Menteri. Wilayah persekutuan Malaysia terdiri dari 3 daerah yaitu: Kuala Lumpur yang dibentuk pada tanggal 1 Februari 1974, Labuan yang dibentuk tanggal 16 April 1984. Saat ini, Labuan ditetapkan menjadi pusat keuangan lepas pantai dan pusat pelabuhan bebas bea cukai, dan Putrajaya yang dibentuk pada tanggal 1 Februari 2001. Putrajaya dibentuk sebagai pusat administratif federal, yaitu pusat pemerintahan Malaysia dan tempat kepala pemerintahan (yakni Perdana Menteri) berada. Secara geografis, Kuala Lumpur dan Putrajaya berada di negara bagian Selangor, sedangkan Labuan berada di negara bagian Sabah di ujung Pulau Kalimantan; (https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah_persekutuan)

Putrajaya Holding dengan pembagian perusahaan minyak negara Petronas (40%) Khazanah Holdings (40%) dan Kumpulan Wang Amanah Negara (20%).³⁷

Pemegang saham utama adalah Petronas, perusahaan minyak nasional Malaysia, ada juga pemegang konsesi, pemilik tanah dan pengembang utama untuk Putrajaya. Perusahaan harus mengambil sebagian besar biaya dan bagian pemerintah dibatasi hingga USD 1 miliar dari infrastruktur yang dipilih. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan Putrajaya Holdings tanah untuk pengembangan komersial. Pemerintah menandatangani perjanjian untuk membayar sewa Putrajaya selama 25 tahun untuk pembangunan semua bangunan pemerintah. Didukung oleh sewa 25 tahun mereka dengan pemerintah telah memungkinkan perusahaan untuk mengamankan obligasinya. Sistem ini telah digunakan secara luas di Putrajaya.³⁸

Tidak ada keterlibatan pihak asing dalam pembiayaan ibu kota pemerintahan Malaysia. Dengan demikian, kemandirian pemerintah lebih terjaga dari intervensi berbagai kepentingan asing yang berpotensi mereduksi kedaulatan dan pembuatan “kebijakan pesanan” yang pada hakekatnya merugikan kepentingan nasional.

5. Kesimpulan

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, polanya tidak bisa *copy paste* dari apa yang dilakukan Malaysia saat memindahkan ibu kota Kuala Lumpur ke Putrajaya. Karakteristiknya berbeda. Akan tetapi, dari uraian di atas, ada beberapa yang bisa diambil pelajaran.

³⁷ <https://blog.ppi.gov.my/2014/05/kronologi-pembangunan-pusat-pentadbiran.html>. Lihat juga Levu ‘Vincent’ Tran, hal. 36 dan Ross King, hal. 128-129.

³⁸ Sarah Moser, *New Cities: Opportunities, Visions and Challenges Cityquest KAEC Forum 2013: Summary and Analysis Report*, New Cities Foundation, 2014, hal. 20; <https://newcities.org/wp-content/uploads/2014/06/PDF-CityquestKAECForum-Report-Sarah-Moser.pdf>

Pertama, pemisahan ibu kota negara dengan pusat pemerintahan. Malaysia tetap beribukota di Kuala Lumpur, sementara pusat penyelenggaraan pemerintahan federalnya berada di Putrajaya. Selain tetap menjadi ibu kota negara, Kuala Lumpur juga tetap menjadi pusat ekonomi dan keuangan. Indonesia bisa meniru model ini dengan tetap menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi bisnis, sementara pusat pemerintahannya dipindah ke tempat lain. Syaratnya, jarak kedua kota tidak terlalu jauh sehingga memudahkan koordinasi dan konsolidasi.

Kedua, merepresentasikan ideologi nasional dan identitas bangsa. Sejak awal perencanaan, pemerintah Malaysia telah berkomitmen desain ibu kota baru Putrajaya harus mengejawantahkan ideologi dan nilai-nilai budaya Melayu dan Islam sebagai identitas Malaysia. Doktrin trinitas harmoni antara Allah-Manusia-Alam menjadi inspirasi arsitektural pembangunan Putrajaya.

Ketiga, mekanisme pembiayaan tidak “menggadaikan negara” kepada asing. Pembiayaan pembangunan Putrajaya tidak mengandalkan utang luar negeri yang kelak akan menjerat negara tersebut, tetapi mengandalkan kemampuan sendiri melalui skema pembiayaan patungan yang meringankan beban negara. Inilah yang oleh Bung Karno disebut “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri).

Keempat, lebih mengutamakan potensi nasional dan jati diri bangsa. Sejak awal perencanaan, Malaysia bertekad segala hal yang terkait dengan pemindahan ibu kota harus dalam kerangka *made-in-Malaysia* and *made-by-Malaysian*. Hal itu terlihat dari para arsitek, konsultan dan tenaga ahli yang terlibat semuanya putra-putri terbaik Malaysia.

Kelima, pemindahan ibu kota merupakan program pembangunan nasional berkelanjutan. Proses pemindahan ibu kota negara memerlukan waktu yang lama yang tidak akan selesai dalam satu periode kepemimpinan. Oleh karena

itu harus ada komitmen pemerintahan berikutnya untuk melanjutkan program itu sebagai program prioritas nasional sehingga tidak akan tersendat atau bahkan terbengkalai.

Keenam, menjaga keselarasan dengan alam. Pemindahan ibu kota bukan hanya pemindahan bangunan fisik gedung-gedung yang megah tetapi juga harus memperhatikan keselarasan dengan alam sekitar. Alokasi lebih dari sepertiga luas kawasan Putrajaya untuk lahan terbuka hijau menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan kota yang berkonsep “*city in the garden.*”

Ketujuh, daerah ibu kota mendapat status daerah khusus atau wilayah persekutuan. Setelah Putrajaya berstatus sebagai ibu kota pemerintahan, daerah itu tidak lagi berada di bawah yurisdiksi negara bagian Selangor tetapi langsung berada di bawah otoritas Pemerintah Federal dengan mendapatkan status wilayah persekutuan. Hal ini sangat penting untuk efektifitas pengambilan kebijakan strategis berskala nasional.

REFERENSI

Buku

Abu Hasan Adam, *Menghala Wawasan 2020*, Arena Ilmu, Kuala Lumpur, 1992

David L.A. Gordon (ed), *Planning Twentieth Century Capital Cities*, Routledge: New York, 2006.

Klaus-Jürgen Nagel (ed.), *The Problem Of The Capital City New Research On Federal Capitals and Their Territory*, Institut d'Estudis Autònoms: Barcelona, 2013

Ross King, *Kuala Lumpur and Putrajaya, Negotiating Urban Space in Malaysia*, NUS Press: Singapore, 2008.

Sarah Moser, *New Cities: Opportunities, Visions and Challenges Cityquest KAEC Forum 2013: Summary and Analysis Report*, New Cities Foundation, 2014

Vadim Rossman, *Capital Cities: Varieties and Pattern of Development and Relocation*, Routledge, London and Newyork, 2017

Jurnal/Makalah/Tesis

Chin Siong Ho, *Putrajaya Administrative Centre of Malaysia Planning Concept and Implementation*; http://eprints.utm.my/id/eprint/6622/1/HoChinSiong2006_Putrajaya-AdministrativeCentreOfMalaysia.pdf.

Levu 'Vincent' Tran, *In The Name of Utopia, The Case Study of Putrajaya*, University of Florida, 2010.

Mohamad Sukeri Bin Khalid, "Moving Capital City: Comparison Studies Between Indonesia and Malaysia," makalah seminar di UUM Kuala Lumpur, 8 Desember 2019.

Ross King , "Re-writing the City: Putrajaya as Representation", *Journal of Urban Design*, Vol. 12. No. 1, February 2007.

Sarah Moser, *Putrajaya: Malaysia's new federal administrative capital*, Cities 27, August 2010.

Scott Campbell, *The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era*, Urban and Regional Planning Program, College of Architecture and Urban Planning University of Michigan, 2003

Suyatno, *Moving Capital City and Geopolitics of Indonesia*, makalah seminar “Moving Capital City: Comparison Studies Between Indonesia and Malaysia” di Universiti Utara Malaysia (UUM), Kampus Kuala Lumpur, 8 Desember 2019.

Website

<http://www.kabinet.gov.my/bkpp/index.php/anggota-pentadbiran/menteri>

https://id.wikipedia.org/wiki/Yang_di-Pertuan_Agong

<http://www.kwp.gov.my/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah_persekutuan

<https://www.ppj.gov.my/>

<https://blog.ppj.gov.my/2014/05/kronologi-pembangunan-pusat-pentadbiran.html>

<https://bisnis.tempo.co/read/1238561/wawancara-khusus-jokowi-pindah-ibu-kota-belajar-dari-malaysia>

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/10/101029_seri4jaka_rtapindah;

<https://nasional.kompas.com/read/2010/09/03/19393338/sby.pindahkan.ibu.kota.solusi.kemacetan>.

Biografi Tokoh Dunia: Tunku Abdul Rahman,

<https://internasional.kompas.com/read/2019/02/08/20291541/biografi-tokoh-dunia-tunku-abdul-rahman-bapak-kemerdekaan-malaysia?page=1>.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190513/19/921957/rencana-pemindahan-ibu-kota-belajar-dari-pengalaman-putrajaya>

The Intelligent Garden City of Putrajaya, <https://newcities.org/cityquest-putrajaya-malaysia-designed-intelligent-garden-city/>

https://www.kompasiana.com/rochman_hadi/5d64b08e097f36770221f4e2/belajar-dari-putrajaya-ibukota-baru-malaysia?page=2

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/10/101029_seri4jaka_rtapindah

<https://www.kompasiana.com/mullakemalawaty/552fc51e6ea83457368b45c7/putrajaya-kota-modern-yang-ramah-lingkungan>